

Judul : Akhirnya, Target Pajak Dipertahankan
Tanggal : Jumat, 05 Februari 2016
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 4

► **APBN 2016**

Akhirnya, Target Pajak Dipertahankan

JAKARTA — Kementerian Keuangan berubah pendirian dan menyatakan tidak akan melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dalam revisi APBN 2016 sebesar Rp1.360,2 triliun. Target tersebut lebih tinggi 22,07% dari realisasi penerimaan tahun lalu.

Arys Aditya, Irene Agustine
 & Kurniawan A. Wicaksono
 redaksi@bisnis.com

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Otoritas Fiskal menyampaikan akan membuat target pajak menjadi lebih realistis pada tahun ini setelah catatan *short-fall*—selisih antara penerimaan dan target—tahun lalu melompat menjadi sekitar Rp230 triliun.

Level yang dianggap realistis dinilai maksimal hanya 15%, dengan asumsi pertumbuhan alamiah (pertumbuhan ekonomi dan inflasi) ditambah *extra effort* plus realisasi *tax amnesty*, diiringi upaya untuk meningkatkan *tax ratio*.

Tekad mempertahankan target penerimaan pajak ini dapat dimaklumi karena opsi pemasukan makin terbatas setelah harga minyak dunia yang anjlok membuat penerimaan negara bukan pa-

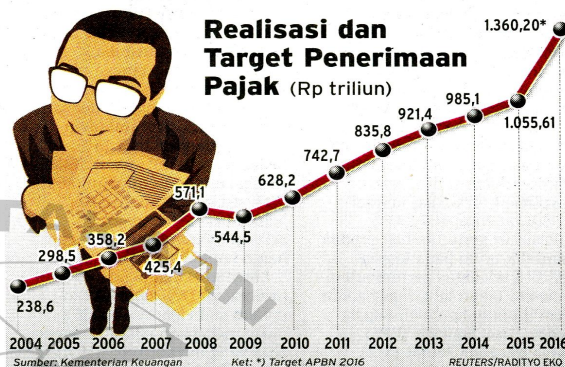
jak (PNBP) minyak dan gas akan terseret turun.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemahaman harga minyak berdampak pada penerimaan pajak Januari 2016 yaitu turun di kisaran Rp3 triliun secara tahunan. Di sisi belanja negara, pemerintah belum memberikan sinyal untuk memangkas anggaran, baik belanja pemerintah pusat, subsidi atau transfer ke daerah dan dana desa.

"Kami baru bertemu Presiden [Joko Widodo] dan meyakinkan bahwa target pajak masih bisa *achieved*, tetapi memang *tax amnesty* harus sukses," kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/2).

Selain mengandalkan *tax amnesty* yang aturannya kini masuk tahap finalisasi, Menkeu mengatakan pihaknya menyampaikan sejumlah *extra effort* kepada Presiden dalam mencapai target itu seperti penegakkan hukum yang maksimal, ekstensifikasi, optimalisasi revaluasi aset dan penguatan wajib pajak orang pribadi.

Bambang melanjutkan skema repatriasi dana dalam *tax amnesty* nantinya akan dilakukan dalam instrumen obligasi pemerintah, obligasi khusus atau BUMN dan de-



posito satu bulan di Bank. "Kami sediakan instrumennya, nanti teresah yang mau repatriasi bagaimana, mereka punya pilihan."

TUNGGU DPR

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi mengatakan target pajak dalam APBN 2016 tidak realistis, meskipun dengan tambahan instrumen pengampunan pajak. Pasalnya, peluang yang bisa diambil DJP untuk mengakselerasi penerimaan negara baru mulai terlihat pada 2017 setelah dananya masuk.

"Jadi tidak bisa seperti makan cabai. Kalau dia masuk *kan* berakhir pada Desember 2016 ini, 2017 baru ada efek-efeknya. Menurut kami sih Rp50 triliun bisa masuk ke kas negara tahun ini lewat penalti [uang tebusan]," katanya.

Menurut dia, ambisi pemerintah untuk mempertahankan target penerimaan pajak dalam APBN 2016 itu bisa membuat gusar pelaku usaha karena Otoritas Pajak bisa jadi sekadar menasars wajib pajak

yang sudah ada dibandingkan dengan melakukan ekstensifikasi.

Sementara itu, dalam perhitungan Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam, total penerimaan pajak yang masuk pada tahun ini hanya mencapai Rp1.140,94 triliun jauh lebih rendah dari target APBN 2016 senilai Rp1.360,2 triliun.

Mengenai kemungkinan revisi dalam APBN Perubahan 2016, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suhasil Nazara mengatakan apabila ada penyesuaian terhadap komponen-komponen dalam APBNP, pemerintah masih menunggu hasil persetujuan akhir UU Pengampunan Pajak dengan DPR.

"Pengajuan APBNP menunggu *tax amnesty* untuk bisa menghitung [target penerimaan] pajak dengan baik. Untuk itu, harus jelas dulu seperti apa *tax amnesty* yang di-approve oleh DPR dalam bentuk UU, baru kita bikin estimasi penerimaannya," tuturnya di Kantor Wakil Presiden. 2

► **Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai ambisi pemerintah tidak realistis.**

► **Angka maksimal penerimaan pajak tahun ini diprediksi Rp1.140,94 triliun.**